Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Skripsi Oleh :

Indah Riyanti
Nim : 01071003010

Untuk Memenuhi Sebagaian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2011

S
657.835 07
Ind
P
2011
Record : 22209
Reg : 22673

Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh :

Indah Riyanti
Nim : 01071003010

Untuk Memenuhi Sebagaian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 08 Agustus 2011	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 195808281988101001
Tanggal 08 Agustus 2011	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 29 Juli 2011

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak	Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak	Ika Sasti Ferina,SE,Ak
NIP 195808281988101001	NIP 196409031994032001	NIP. 197802102011220 01

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

NIP 195808281988101001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB I

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 18/4 11	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 19580828198810001
Tanggal 18/3 11	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB II

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 18/4/2011	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 19580828198810001
Tanggal 1/4/2011	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB III

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 27/5/11	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 19580828198810001
Tanggal 5/5/11	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB IV

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 18/7/2011	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 19580828198810001
Tanggal 14/6 2011	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI BAB V

NAMA	: INDAH RIYANTI
NIM	: 01071003010
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 18 / 7 / 2011	Ketua	: Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. NIP 19580828198810001
Tanggal 27 / 06 2011	Anggota	: Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak NIP 196409031994032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Riyanti

NIM : 01071003010

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **"Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas".**

Pembimbing

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

Anggota : Hj.Rochmawati Daud, SE.,M.Si.,Ak

Tanggal diuji : 29 Juli 2011

adalah benar- benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 1 Agustus 2011

Yang memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL

0F6BFAAF602664813

6000

Indah Riyanti

NIM 01071003010

MOTTO & PERSEMBAHAN

"Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan melimpahkan rizki-Nya dengan cara yang tidak ia perkirakan. Barang siapa bertawakkal kepada Allah maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya."

"QS. Ath-Thalaq : 2-3"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakannlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah berharap."

"QS. Al Insyirah : 6-8"

Kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan keberhasilanku
- Adikku
- Teman-teman angkatan 2007
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Data dan Hasil Penelitian, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada setiap SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah cukup berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintahaan Kabupaten Musi Rawas.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi rawas dalam mejalankan otonomi daerah dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penulis,

Indah Riyanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penlisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Burhanudin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus Ketua Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Sulaiman S.Manggala, SE, MBA, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermadiani, SE, MM, Ak, dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Hj.Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
7. Ibu Ika Sasti Ferina, SE, Ak, Anggota Penguji pada Ujian Komprehensif.
8. Bapak Bupati dan staf-staf pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Pimpinan dan staf-staf Badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Sumatra selatan.
10. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang tuaku yang tercinta dan adikku yang telah memberikan dukungan moril dan material selama ini.
12. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat-sahabatku: Sari, Lily, Febrina, Dwi, Rizka, Titan, Intan, Yohana, Cizka, Ina, Meta, Cerya dan teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
14. Teman kosanku: Vebda, Endang, Gery, Ratih, Nita, Ani, Chitra, Fefti, Widya dan yang telah membantu baik materil maupun moril.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 112262
TANGGAL : 30 SEP 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
ABSTRAKSI x
ABSTRACT..... xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.5. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 8
2.1.1. Pengertian Sistem akuntansi Keuangan Daerah..... 8
2.2. Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik..... 13
2.2.1. Transparansi..... 13
2.2.2. Akuntabilitas..... 14
2.3. Pelaporan Keuangan Daerah 20
2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah..... 20
2.3.2. Komponen Laporan Keuangan Daerah..... 22
2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan Daerah..... 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian 26

3.2. Metode Penelitian 26
3.2.1. Jenis Penelitian 26
3.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 26
3.2.3. Jenis Data 26
3.2.4. Metode Pengumpulan Data 27
3.2.5. Populasi dan Sampel 28
3.2.6. Operasi Variabel 29
3.3. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen 31
3.3.1. Uji Validitas Instrumen 31
3.3.2. Uji Realibilitas Instrumen 32
3.4. Metode Analisis Data 33
3.5. Penetapan Tingkat Signifikansi 35
3.6. Penetapan Ho dan Hi 35
3.7. Pengambilan Keputusan 36
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum 37
4.1.1. Sejarah Singkat 37
4.1.2. Letak Geografis 38
4.1.3. Luas Wilayah 38
4.1.4. Batas Wilayah 38
4.1.5. Iklim dan Topografi 39
4.1.6. Luas Wilayah 39
4.1.7. Kependudukan 39
4.2. Organisasi dan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas..... 40
4.3. Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas 43
4.3.1. Visi Kabupaten Musi Rawas 43
4.3.2. Misi Kabupaten Musi Rawas 43
4.4. Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 44
4.5. Pelaporan Keuangan..... 46
4.6. Hasil Penelitian..... 47
4.7. Hasil Pengujian dan Kualitas Data..... 48
4.7.1. Pengujian Validitas..... 48
4.7.2. Pengujian Reliabilitas..... 49

4.8. Pengujian Hipotesis..... 56
4.8.1. Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungannya..... 57
4.8.2. Korelasi Rank Spearman..... 64
4.9. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas..... 73
4.10. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas..... 79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 85
5.2. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	10
Tabel 3.4.	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	35
Tabel 4.1.	Jenis Kelamin Responden.....	47
Tabel 4.2.	Lama Bekerja Pada Bagian Keuangan.....	47
Tabel 4.3	Latar Belakang Pendidikan.....	48
Tabel 4.4.	Ikhtisar Uji Validitas.....	49
Tabel 4.5.	Uji Reabilitas Transparansi.....	50
Tabel 4.6.	Uji Reabilitas Akuntabilitas.....	53
Tabel 4.7.	Jawaban Responden Untuk Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).....	57
Tabel 4.8.	Jawaban Responden Untuk Variabel Transparansi.....	60
Tabel 4.9	Jawaban Responden Untuk Variabel Akuntabilitas.....	62
Tabel 4.10.	Perhitungan Nilai Selisih Kuadrat Transparansi.....	64
Tabel 4.11.	Perhitungan Faktor Koreksi Atas Skor Yang Berangka Sama.	67
Tabel 4.12.	Perhitungan Nilai Selisih Kuadrat Akuntabilita.....	69
Tabel 4.13.	Perhitungan Faktor Koreksi Atas Skor Yang Berangka Sama.	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....

Lampiran 2 Menu-Menu Sistem Informasi Pegelolaan Keuangan daerah...

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008 dan 2009.....

Lampiran 4 Laporan Arus Kas Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2008 dan 2009.....

Lampiran 5 Neraca Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Per 31 Desember 2008 dan 2009.....

Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki peran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) cukup memiliki peran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, antara lain disebabkan otorisasi transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait, hasil kinerja pemerintah daerah tidak selamanya mudah diakses oleh masyarakat, kurang tepatnya laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintahan daerah, kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan Sumber daya manusia dan menambah variabel yang mungkin berpengaruh untuk menguji Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan daerah

Role of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability in Government Financial Reporting Musi Rawas District

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze whether the Financial Accounting System (SAKD) have a role in creating transparency and accountability in government financial reporting Musi Rawas District.

The results showed that the area of financial accounting systems (SAKD) enough to have a role in creating transparency and accountability of financial reporting areas. The factors that cause small areas of financial accounting system's role in creating transparency and accountability of financial reporting areas, partly due authorization of transactions by related parties, the performance of local governments are not always easily accessible to the public, less precise financial reports issued by local government , the quality of human resources in the areas of financial accounting systems implementation.

Expected to further research in order to pay attention to human resources and add variables that may affect to test the area of Financial Accounting Systems bring transparency and accountability in financial reporting.

Key words: financial accounting system area (SAKD), transparency, accountability, financial reporting areas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah. Kondisi ini ditegaskan dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Perpu No.3 tahun 2005 serta UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 yang merupakan tonggak awal otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian 2007 :2).

Dengan pelaksanaan otonomi ini, daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat, serta mengelola keuangannya sendiri. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Pembuatan laporan keuangan adalah bentuk kebulatan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintahan atas aktivitas penegelolaan sumber daya publik.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi (Bastian 2007 :2).

Perubahan sistem politik, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan didasari oleh para manajer Pemerintaha Daerah. Menurut PP No. 105 / 2000 yang diganti menjadi PP No. 58 / 2005 yaitu mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk lapoaran keuangan (neraca daerah, laporan arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Sehingga menuntut pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar pentingnya dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya secara ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah ini dijalankan oleh bagian keuangan pemerintahan daerah.

Agar transparansi dan akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan maka diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang trasparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD) yang diharapkan akuntabilitas dan trasparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim 2004: 35).

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Sebagaimana pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas telah mengimplementasikan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menciptakan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan publik. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum yaitu dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Namun akuntabilitas dan transparansi publik juga melekat pada fungsi pengendalian dan pengawasan, maka informasi yang disajikan terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus *auditable* atau dapat diaudit oleh baik aparat internal dan eksternal pengawasan fungsional Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) maupun auditor lainnya yang terkait.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sumatra Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2005 mendapatkan opini yaitu *Disclaimer* dan pada tiga tahun terakhir ini (2008, 2009 dan 2010) Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sumatra Selatan memberikan opini terhadap LKPD Kabupaten Musi Rawas yaitu Wajar Dengan Pengecualian(www.docstoc.com/Bab-IX-Provinsi-SumateraSelatan).

Perubahan opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ini yang menjadi dasar dalam pengambilan objek pada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut akan dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemimpin daerah selain indikator-indikator yang bersifat makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang terkendali, kesempatan kerja yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin berkurang, keamanan yang kondusif dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Hal tersebut terdapat pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015 pada BAB III tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Pasal 225 yang menyangkut tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, diharapkan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas dan trasparansi dapat terwujud sesuai dengan PP No. 105 / 2000.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka saya sebagai peneliti ingin membahas tentang" **Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas"**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
2. Bagaimana peranan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan masalah yang timbul seperti telah diungkapkan diatas adalah :

1. Untuk menilai dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk menilai dan menganalisis peranan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan trasparansi pelaporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan pihak terkait.

   Peneliti dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Musi Rawas. Kemudian dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Sekaligus dapat membarikan tambahan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat.

3. Bagi pembaca

Dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian skripsi ini akan disajikan secara sistematik yang terbagi menjadi lima bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukanya penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi penyusunan skripsi ini. Peneliti hanya menuliskan teori-teori yang mempunyai relevansi yang mendukung proses penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang berupa objek,ruang lingkup penelitian, sumber data, jenis data,teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini kan membahas tentang gambaran umum objek penelitian, mulai dari sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Musi Rawas, kondisi geografis, visi dan misi, stuktur organisasi dan kondisi keuangan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas serta membahas mengenai peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengungkapkan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian dan juga memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian.

Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bastari, Imam. 2004. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah.* Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi pemerintahan. diakes pada tanggal 20 Januari 2011.

Baswir, Revrisond. 2002. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Edisi Ketiga Yogyakarta: BPFE.

BPKP. 2008. *Transparansi : Seri Budaya Kerja,* Buku Panduan Taransparansi, Jakarta, diakes pada tanggal 20 Januari 2011.

Deputi IV BPKP.2005. www.bpkp.go.id/unt/sakd/abkrevisi.pdf. diakes pada tanggal 20 Januari 2011.

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekomoni Universitas Sriwijaya.* Fakultas Ekonomi Universitas.

Firmansyah. Iman. 2008. Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survai Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi jawa barat). Skripsi Falultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.

Ganie-Rochman, Meuthia, (2000) artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapanny", dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.

Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: penertbit ANDI.

Mahsun, Mohammad. 2006 . *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo, 2000, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik,* Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), Makasar 21-23 April 2000 Hal 248-265.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi

Pemerintahan Vol. 2, No. 1. Diambil pada tanggal 28 September 2010 dari http://www.bppk.depkeu.go.id.

www.docstoc.com/Bab-IX-Provinsi-SumateraSelatan. diakses tanggal 15 maret 2011

www.musirawas.go.id diakes pada tanggal 20 Januari 2011

Nasution, Anwar, 2004. *BPK dan Transparansi Fiskal,*

Nordiawan, Deddi.2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58. 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105. 2000.Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2002. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pegurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia.2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Solihin, Dadang. 2007. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel* ,yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel (diakses tanggal 22 Februari 2011)

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Somantri, Anting dan Muhidin, Ali. 2006. *Aplikasi statistika dalam Penelitian.* Bandung: Penerbit CV PUSTAKA SETIA.

Tanjung, Abdul. H. 2008. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).* Diambil Pada Tanggal 2 Februari 2011.